

KEPEMIMPINAN, ETOS KERJA DAN KETERAMPILAN KERJA TIM

(Leadership and Team Working Skills)

Dr. Fereddy Siagian, M.Th.,M.M.

Dr. Drs Willem Nikson Sitompul, M.M

Susilawati, S.E.,M.M.

KATA PENGANTAR

Kehadiran buku ini merupakan tonggak penting dalam upaya mendalami dan mengapresiasi pentingnya dimensi maritim dalam konteks pendidikan, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Melalui pendekatan yang komprehensif, buku ini menguraikan secara sistematis berbagai aspek yang relevan dengan Maritim dari sudut pandang pendidikan, kepemimpinan, dan teamwork.

Dalam era globalisasi yang semakin menguat, keberadaan sektor maritim tidak lagi hanya menjadi bagian dari aspek ekonomi semata, namun juga menjadi fondasi yang mendasari berbagai kebijakan internasional. Melalui pemaparan yang cermat, buku ini membawa pembaca untuk memahami bagaimana kebijakan internasional berperan dalam mengatur dan mengelola segala aspek yang terkait dengan maritim.

Selain itu, buku ini juga menyoroti karakter kepemimpinan maritim dan pelayaran yang esensial dalam membangun dan mengelola sumber daya manusia di bidang ini. Dengan mendalami konsep, fenomena, dan teori kepemimpinan, pembaca diajak untuk memahami betapa pentingnya peran kepemimpinan dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia maritim.

Tak ketinggalan, buku ini turut membahas tentang kerjasama tim yang terstruktur dan integral dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang maritim. Melalui aplikasi tes pemahaman leadership and teamwork skills, pembaca akan diuji dalam pemahaman mereka terhadap konsep kepemimpinan dan kerjasama tim, serta bagaimana menerapkannya dalam konteks maritim.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang berharga bagi para praktisi, akademisi, dan pemerhati maritim dalam menjelajahi dunia yang penuh dengan potensi dan tantangan ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, semoga ilmu yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan sektor maritim secara global.

Bekasi, Desember 2023

Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR PUSTAKA.....	vii
BAB 1MARITIM DARI SUDUT PANDANG PENDIDIKAN.....	1
A. Pemaknaan Pengertian Maritim Dari Aspek Pendidikan	2
B. Pengertian Maritim Dari Aspek Pendidikan	3
BAB 2LEADERSHIP AND TEAMWORK SKILLS KEMARITIMAN SESUAI AMANAH AMANAH KEBIJAKAN INTERNASIONAL	11
A. Manusia dengan Permasalahannya	11
B. Pendidikan tentang Kepemimpinan	12
C. Pentingnya Leadership, Teamwork dan Etos Kerja Dalam Bidang Kemaritiman ...	14
D. Teori Pendukung Pentingnya <i>Leadership</i> Dan <i>Teamwork</i> Dalam Bidang Kemaritiman	16
BAB 3KARAKTER KEPEMIMPINAN MARITIM	22
A. Karakter Kepemimpinan yang Mengandalkan Kekuasaan Tuhan YME	22
B. Karakter Kepemimpinan yang Mengutamakan Budaya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	23
C. Karakter Kepemimpinan yang Berlandaskan Kebersamaan untuk Mencapai Tujuan Kerja	24
D. Karakter Kepemimpinan Selaku Otoritas Maritim	25
E. Karakter Kepemimpinan Sebagai Mercusuar Maritim	27
F. Karakter Kepemimpinan Maritim yang Netral	28
G. Karakter Kepemimpinan Pemerhati Kebutuhan	30
BAB 4KEPEMIMPINAN DAN KERJASAMA DALAMUNSUR, HIRARKHI, TANGGUNG JAWAB DAN SIKLUS MANAJEMEN ORGANISASI.....	35
A. Terminologi Manajemen	35
B. Unsur Unsur Manajemen	37
C. Hirarkhi Manajemen.....	38
E. Pembagian Tanggung Jawab	40
F. Siklus Manajemen.....	41
BAB 5KEPEDULIAN ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL.....	45
A. Kepentingan Keanggotaan Negara Indonesia di dalam <i>International Maritime Organization</i> (IMO).....	46

BAB 6	KEPEMIMPINAN DALAM KONSEP FENOMENA DAN TEORI	50
A.	Kepemimpinan Dalam Konsep	50
B.	Fenomena Kepemimpinan	54
C.	Teori Kepemimpinan	56
BAB 7	KEPEMIMPINAN DALAM GAYA DAN MODEL	60
A.	Kepemimpinan Dalam Gaya	60
BAB 8	LATIHAN PERTAMA PEMAHAMAN KEPEMIMPINAN DALAM ETIKA	77
A.	Bahan Latihan Pemahaman Kepemimpinan Dalam Etika Kasus	77
BAB 9	TUJUAN KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI	79
A.	Pengertian Kepala Dengan Pemimpin	79
B.	Perbedaan dan Persamaan Kepala Dengan Pemimpin	80
C.	Kepemimpinan Efektif	82
BAB 10	KEPEMIMPINAN SUPERVISI PENDIDIKAN	85
A.	Pendekatan, Model Dan Gaya Kepemimpinan Supervisor Pendidikan	85
B.	Pendekatan Dan Penanganan Guru	86
C.	Model Kepemimpinan Supervisor	88
D.	Gaya Kepemimpinan Supervisor Pendidikan	89
BAB 11	SUMBER DAYA MANUSIA MARITIM DALAM MAKNA KEPEMIMPINAN PELAYARAN	94
A.	Hubungan Sosial Dalam Lingkungan Kerja	94
B.	Perjanjian Kerja Laut (PKL)	96
C.	Harmonisasi Dan Motivasi SDM Maritim Pada Kegiatan Pelayaran	97
D.	Kepemimpinan Nakhoda Kapal	101
E.	Navigasi	105
F.	Training	106
G.	Kesehatan, Keselamatan, Kebersihan Dan Hal-Hal Kesejahteraan	106
H.	Penanganan Barang, Ballast, Dan Tank Cleaning	107
I.	Penggantian Nakhoda	107
J.	Inspirasi Kepemimpinan Nakhoda Kapal	108
K.	Kepemimpinan Nakhoda Kapal Dalam Mendukung Kebutuhan/ Kepentingan Masyarakat	111
L.	Kepemimpinan Nakhoda Kapal Dalam Membina SDM Internal	113
BAB 12	KERJASAMA (TEAM WORK) YANG TERSTRUKTUR	116
A.	Karakteristik Tim	116

B.	Mengapa Tim Diperlukan	117
C.	Tujuan Tim.....	118
D.	Membangun Tim Yang Baik.....	119
E.	Unsur-Unsur Dalam Teamwork	123
F.	Jenis Teamwork	125
G.	Tahap Perkembangan Teamwork	126
H.	Peranan Anggota Tim.....	127
I.	Dimensi Tim yang Efektif.....	127
j.	Manfaat dan Fungsi Tim Kerja	128
K.	Pengalaman teamwork.	129
L.	Implikasi Manajerial	129
BAB 13KERJASAMA DALAM KEPEMIMPINAN		131
A.	Teori Managerial Grid	132
B.	Manajemen Teamwork.....	133
C.	Komparatif Team Work Yang Diharapkan.....	135
D.	Spirit Jiwa Dan Pendidikan Untuk Berinteraksi Dengan Pihak Lain Dalam Bingkai <i>Team Work</i> Di Bidang Pelayaran	136
E.	Rahasia Manajemen Tim Yang Sukses	137
F.	Komunikasi Efektif Bagi Team Work.....	139
G.	Alasan Penting Menjaga Komunikasi Saat Bekerja.....	140
H.	Elemen-Elemen Komunikasi Interpersonal	141
I.	Komunikasi Sebagai Proses	142
J.	Komunikasi Efektif di Kapal - Arus Bluewater Cruises	144
BAB 14APLIKASI TES PEMAHAMAN LEADERSHIP AND TEAM WORKING SKILLS		149
A.	Tes Kepribadian: Bekerja Dalam Tim (<i>Team Work Test</i>).....	149
B.	Tes Kepribadian: Tanggung Jawab	151
BAB 15LATIHAN KEDUA PEMAHAMAN KEPEMIMPINAN DALAM ETIKA		156
A.	Bahan Latihan Kedua Pemahaman Kepemimpinan Dalam Etika	156
DAFTAR PUSTAKA.....		160
PROFIL PENULIS		162

BAB 1

MARITIM DARI SUDUT PANDANG PENDIDIKAN

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, banyak menjelaskan berkenaan dengan laut, pelayaran, menyangkut masalah maritim, istilah maritim, istilah bahari, kemungkinan yang sama bisa saja terdapat pada berapa literatur lainnya. Makna dari uraian di atas sementara ini menunjukkan, banyak istilah maritim yang sering diperdengarkan belum ada pengertian yang baku seperti apa.

Dalam dunia pendidikan, sebaiknya pengertian maritim ini diharapkan mempunyai pemaknaan yang lebih luas, tidak sempit seperti beberapa literatur yang ada, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya.

Dimaksud dengan pemaknaan, yaitu bila pengertian yang diberikan dikaitkan dengan istilah kelautan dan bahari, maka cenderung sangat sempit, kemudian bila dikaitkan dengan istilah *marine constitution* atau konstitusi kelautan, masih kurang pas mengingat kalimat konstitusi sifatnya luas tidak bersifat parsial.

Pemaknaan dalam dunia Pendidikan, adalah penggunaan atau lebih tepat bila pengertian maritim digunakan untuk aspek tertentu saja, sebagai contoh dari aspek “hukum” untuk *marine law*, dari aspek budaya, untuk budaya bahari., sehingga lebih bersifat pembelajaran dalam setiap mata kuliah yang sedang membahasnya, berbeda bila dikaitkan dengan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia terhadap arti Laut, menjadi sangat tidak *update/kuno*, kesannya lama sekali sehingga kurang tepat, yaitu Laut menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berkumpulnya air (asin), sehingga pemaknaan atau penggunaannya dalam dunia pendidikan, belum bersifat pembelajaran.

Dalam dunia pendidikan yang bersifat netral sebaiknya definisi maritim jangan terlalu sempit atau terbatas tetapi dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti, aspek sosial-budaya, aspek pertahanan keamanan, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek IPTEK dan lain sebagainya. Dilemanya *International Maritime Organization* (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional, terhadap pengertian maritim yang diharapkan terjabar secara luas, menjadi berbanding tidak lurus dengan pemaknaan maritim mengapa, karena bila ditinjau dari organisasi tersebut dalam fungsi dan perannya hanya mengatur pemaknaan terhadap kapal saja.

Program pemerintahan Presiden RI Joko Widodo pada periode 2014-2019 dilanjutkan pada periode 2019-2024, menuangkan wacana terhadap kemaritiman sangat kental ditonjolkan untuk menjadi bagian kebijakan pembangunan negara, sehingga banyak aspek keilmuan yang harus digali dan pentingnya keterkaitan antar semua pihak untuk tidak berdiri sendiri, bila menginginkan keberhasilan pembangunan kemaritiman Indonesia. Oleh karena yang paling tepat untuk memahami pengertian yang luas dari maritim itu, yakni dapat dilakukan dengan pendekatan kolaborasi atau integrasi.

A. Pemaknaan Pengertian Maritim Dari Aspek Pendidikan

Dunia pendidikan, memiliki pandangan keilmuan yang cukup luas, tentu saja dalam menyikapi pemaknaan yang luas dari di “Maritim” dengan tinjauan terhadap kegiatannya, aspek yang mempengaruhi kegiatan tersebut, pelaku kegiatan. Bila dirumuskan maka pengertian “maritim” adalah “Segala aktivitas kegiatan maritim yang terkait dengan dunia usaha dan dunia industry, yang tidak terlepas dari aspek sosial-budaya, aspek hankam, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek iptek, Dan Lain Sebagainya”. Rumusan pengertian tersebut bila dikaitkan dengan konsep negara maritim dapat dikatakan berbanding lurus.

Secara umum konsep negara maritim, dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu Indonesia sebagai *The Largest Archipelagic Country In The World*, Wilayah Kedaulatan Dan Yuridiksi Indonesia, dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tiga aspek ini, menunjukkan Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki luas perairan lebih besar dari pada luas daratan, sehingga Indonesia dapat disebut sebagai negara maritim.

Indonesia *The Largest Archipelagic Country In The World*, dalam Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia menuangkan gambaran Indonesia meliputi Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km²; Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km²; Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km²; Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km²; Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km²; Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km²; Luas NKRI (darat dengan perairan) adalah 8.300.000 km²; Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km; Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau (Gambar 1.1)

Wilayah Negara *Kesatuan* Republik Indonesia (NKRI), pada pasal 25 amandemen kedua UUD 1945, menjelaskan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.” Penjelasan pasal tersebut menunjukkan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga dikenal dengan nama Nusantara yang artinya Negara Kepulauan. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas ke Pulau Rote, yang juga menggambarkan negara Indonesia memiliki letak yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua Samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik, sedangkan Indonesia terletak di benua Asia tepatnya di Asia Tenggara, dengan keberadaan pada 6° Lintang Utara (LU) - 11° Lintang Selatan (LS), dan 95° Bujur Timur (BT) - 141° Bujur Timur (BT).

INDONESIA : THE LARGEST ARCHIPELAGIC COUNTRY IN THE WORLD

Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia yaitu;

1. Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km²;
2. Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km²;
3. Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km²;
4. Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km²;
5. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km²;
6. Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km²;
7. Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km²;
8. Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km;
9. Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau



Pasal 25 Amandemen ke-2 UUD 1945
 "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang"

Gambar 1.1. Indonesia *The Largest Archipelagic Country In The World*

Pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah NKRI berjumlah 17.504 terdiri dari pulau besar dan kecil. Beberapa di antaranya, yaitu 6000 pulau tidak berpenghuni. Setengah dari jumlah penduduk Indonesia menempati pulau Jawa. Pulau-pulau yang ada di wilayah NKRI yaitu Pulau-pulau besar, dengan rincian Pulau Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Pulau Kalimantan dengan luas 539.460 km², Pulau Sulawesi dengan luas 189.216 km², Pulau Papua dengan luas 421.981 km². Sedangkan Pulau-pulau kecilnya, dengan rincian antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Ambon, dari Pulau Halmahera. (Gambar 1.2). Mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di pulau-pulau NKRI, maka pemerintah menetapkan wilayah propinsi, di mana dalam Sejarah Indonesia sebagai NKRI penetapan jumlah propinsi tersebut mengalami perkembangan jumlah provinsi Indonesia dari tahun ketahun semakin bertambah. Pada awal kemerdekaan, Indonesia terdiri dari 8 provinsi hingga sekarang telah terbentuk 34 provinsi.

